



BAHAN BPH MIGAS

1. Progress Pembangunan Infrastruktur Gas Bumi
2. Progress Digitalisasi SPBU s.d Triwulan II Tahun 2020
3. Progress BBM 1 Harga

Jakarta, 15 September 2020

PEMBAHASAN

Outline

- 01 Progress Pembangunan Infrastruktur Gas Bumi Melalui Pipa
- 02 Progress Digitalisasi SPBU s.d Triwulan ke-2 Tahun 2020
- 03 Progress BBM 1 Harga



Tugas Dan Fungsi BPH Migas - Berdasarkan UU 22/2001

Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan **pengaturan dan pengawasan** terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM dan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir – **pasal 1 butir 24**

Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga – **pasal 1 butir 10**

FUNGSI

TUGAS

- ❑ Melakukan **pengawasan** terhadap pelaksanaan **penyediaan dan pendistribusian BBM** dan **pengangkutan gas bumi melalui pipa** – **Pasal 46 ayat (1)**
- ❑ Melakukan **pengaturan** agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan Pemerintah **dapat terjamin** di seluruh wilayah NKRI serta **meningkatkan pemanfaatan** gas bumi di dalam negeri – **Pasal 46 ayat (2)**



Progress Pembangunan Infrastruktur Gas Bumi Melalui Pipa

DASAR HUKUM RIJTDGBN & LELANG HAK KHUSUS

RENCANA INDUK JARINGAN TRANSMISI DAN DISTRIBUSI GAS BUMI NASIONAL (RIJTDGBN)

01 UU 22/2001 pasal 27 ayat (1)

“Menteri menetapkan Rencana Induk Jaringan Transmisi Dan Distribusi Gas Bumi Nasional. “

02 PP 36/2004 pasal 34 ayat (2)

“RIJTDGBN ditetapkan oleh Menteri dengan **mempertimbangkan masukan dari Badan Pengatur** dan Badan Usaha serta memperhatikan kepentingan Pemerintah dalam mengembangkan pasar domestik.”

03 Permen ESDM No.4/2018 pasal 4 ayat (5)

“Direktur Jenderal dalam menyiapkan RIJTDGBN **mempertimbangkan masukan dari Badan Pengatur** dan Badan Usaha”

LELANG HAK KHUSUS

“Pengaturan atas pelaksanaan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa meliputi:

- b) memberikan **Hak Khusus** Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada Ruas Transmisi dan pada Wilayah Jaringan Distribusi **melalui lelang** berdasarkan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional

PP 36/2004 Pasal 9 Ayat (1) Huruf (b)

“Berdasarkan RIJTDGBN, **Badan Pengatur melakukan evaluasi dan penetapan** suatu Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi yang akan dilelang Hak Khususnya.”

Permen ESDM No.4/2018 Pasal 7 ayat (1)

HASIL LELANG



No	RUAS	PEMENANG LELANG	PROGRESS	KENDALA	USULAN/SOLUSI
1	Gresik Semarang	PT Pertamina Gas Tarif pengangkutan (Hasil lelang) : 0,25 USD/MMBTU	100%	-	-
		- Tahap selanjutnya diperlukan pembangunan pipa distribusi - Saat ini sedang dibangun pipa distribusi Aroma Kopi (progres: 24,57%)			
2	Cirebon Semarang	PT Rekayasa Industri Tarif pengangkutan (Hasil lelang) : 0,36 USD/MMBTU	0%	Belum ada PPG/GTA dengan calon <i>shipper</i>	a. Melakukan pembicaraan dengan Pertamina Group terkait GTA dan distribusi gas kepada konsumen b. Memulai pembangunan tahap awal ruas Semarang – Kendal, dikarenakan sudah terdapat calon <i>shipper</i> yaitu PT. Pertagas Niaga yang sudah mendapatkan alokasi gas dari JTB.
3	Kalimantan Jawa 2	PT. Bakrie & Brothers (BNBR) Tarif pengangkutan (Hasil lelang) : 0,814 USD/MMBTU	0 %	Belum ada PPG/GTA dengan calon <i>shipper</i>	BNBR perlu bekerjasama dengan PT. Pertagas yang berencana membangun pipa transmisi ruas Senipah-Balikpapan (sejalur dengan ruas pipa Kalija 2)



PENUGASAN

No	RUAS	KONDISI SAAT INI	KENDALA	USULAN/SOLUSI
1	Duri Dumai	a. Realisasi penyaluran 37,1 Mscfd dari desain kapasitas sebesar 170 Mscfd b. Tarif pengangkutan dengan <i>shipper</i> RU II Dumai sebesar: 0,7930 USD/Mscf c. Tarif pengangkutan dengan <i>shipper</i> PT PGN sebesar: 0,8770 USD/Mscf	a. Belum dimulainya operasi RDMP b. Pertumbuhan <i>market</i> gas bumi pada Kawasan Industri Pelintung Dumai masih rendah	a. Mencari alternatif pembeli <i>supplier</i> gas b. Insentif dan kemudahan usaha bagi Badan Usaha di Kawasan Industri Pelintung Dumai
2	WNTS - Pemping	Belum dimulai pembangunan sejak penugasan tahun 2016	a. Menunggu kepastian pasokan gas bumi b. Penugasan kepada PT PGN terkendala karena PT PLN sebagai pemegang alokasi gas (calon shipper) belum memanfaatkan alokasi tersebut untuk di Batam	Pemerintah perlu mendorong PT PGN melakukan PJBG dengan West Natuna Exploration Ltd (Conrad Petroleum) guna pemanfaatan gas bumi di Batam Gas Bumi yang berasal dari WK Duyung (West Natuna)

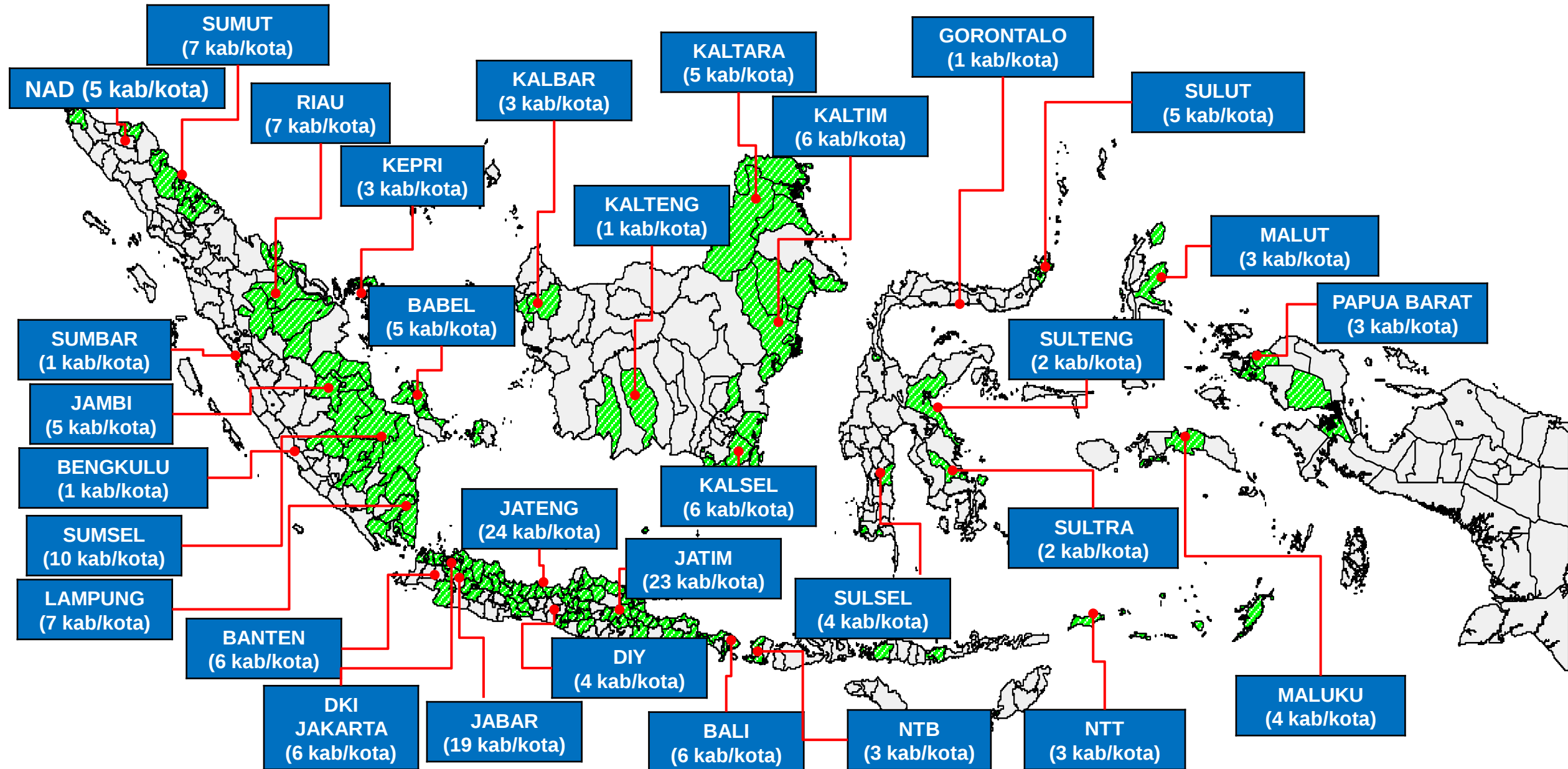
INISIATIF BADAN USAHA



No	RUAS	KONDISI SAAT INI	KENDALA	USULAN/SOLUSI
1	Arun Belawan	a. Gas yang dialirkan 76,71 Mscfd dari desain kapasitas 200 Mscfd b. Tarif pengangkutan (Penetapan BPH) : 1,546 USD/Mscf	a. Penyerapan gas oleh PT PLN yang masih rendah yang semiula direncanakan 150 Mscfd, saat ini hanya 50 Mscfd (dikarenakan pembangkit PLN yang baru menggunakan bahan bakar batu bara dan air) b. Pertumbuhan konsumsi gas oleh industri yang masih rendah	a. Perlu dibangun Kawasan Ekonomi Khusus b. Pembangunan jaringan gas bumi yang dilewati pipa Arun Belawan
2	Grisik Pusri	a. Gas yang dialirkan 75,62 Mscfd dari desain kapasitas 160 Mscfd b. Tarif pengangkutan (Penetapan BPH) : 0,877 USD/Mscf	Rendahnya utilitas pipa yang disebabkan oleh batalnya PLN sebagai <i>shipper</i>	a. Perlu dibangun Kawasan Ekonomi Khusus b. Pembangunan jaringan gas bumi yang dilewati pipa Grisik Pusri



PETA USULAN 190 WJD KAB/KOTA DIUSULKAN OLEH 25 BADAN USAHA



Progress Digitalisasi SPBU

s.d Tiwulan II Tahun 2020

EXECUTIVE SUMMARY PROGRAM DIGITALISASI SPBU



“Program yang dibangun oleh PT. Pertamina (Persero) bekerja sama dengan PT. Telkom Indonesia berdasarkan Penugasan Pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas data penyaluran BBM kepada konsumen serta meningkatkan fungsi pengaturan dan pengawasan BPH Migas terhadap kegiatan pendistribusian BBM di seluruh SPBU, khususnya SPBU yang menyalurkan Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yang dimulai pada 31 Agustus 2018 dengan **target penyelesaian 5518 SPBU terdigitalisasi pada Agustus 2020**.

START

31 Agustus 2018

Penandatanganan perjanjian kerjasama digitalisasi SPBU

TARGET

31 Agustus 2020

Penyelesaian 5.518 SPBU terdigitalisasi

*DODO = 5376, COCO = 142



Terpasang ATG¹⁾

4.819 SPBU
(87,33%)



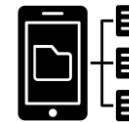
Terpasang EDC
“Link Aja”

3.060 SPBU
(55,45%)



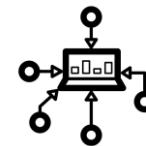
Mencatat Nopol
melalui EDC

1.268 SPBU
(22,98%)



Terdigitalisasi
status BAST²⁾

2.472 SPBU
(44,80%)



Terdigitalisasi
pada dashboard

1.577 SPBU
(28,58%)



Terpasang
CCTV Analytic

0 SPBU
(0%)

¹⁾ Jumlah SPBU yang telah mempunyai dan terinstalasi ATG (Automatic Tank Gauge)

²⁾ Jumlah SPBU yang telah final selesai, yaitu **terintegrasi** dengan pusat data, sehingga data dapat ditampilkan melalui Dashboard Transaksi Digitalisasi SPBU.

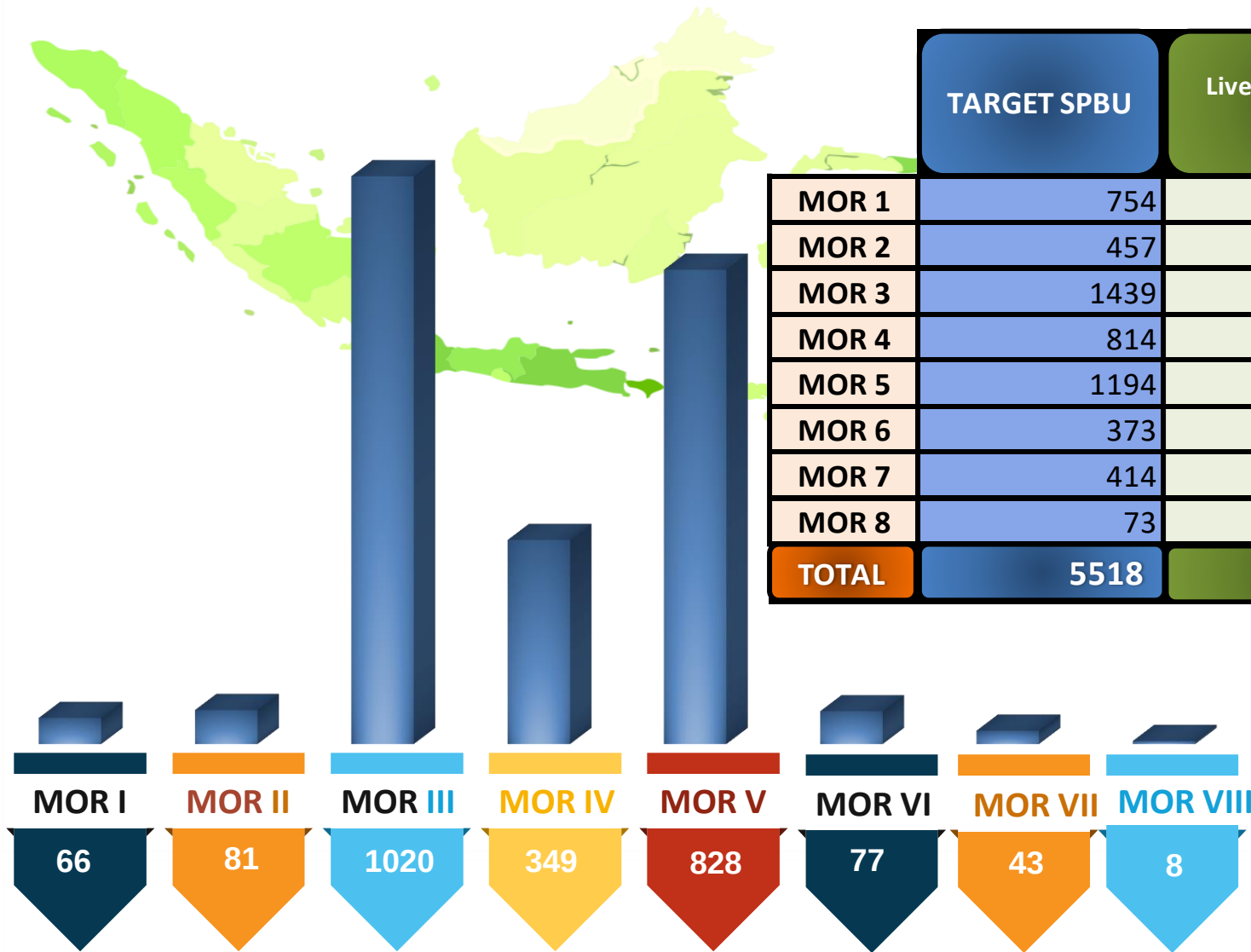
Sumber <https://digispbu.telkom.co.id> per 30 Juni 2020 14:21 WIB



Keluaran yg dihasilkan saat ini belum secara keseluruhan dapat dijadikan perangkat untuk pengawasan dan pengendalian BBM bersubsidi per pengguna kendaraan



SEBARAN PROGRESS DIGITALISASI SPBU



	TARGET SPBU	Live Dashboard & BAST	%	SPBU EDC status Connected	% Kepatuhan pencatatan Nopol berdasarkan jum transaksi
MOR 1	754	66	8,75%	113	19%
MOR 2	457	81	17,72%	73	22%
MOR 3	1439	1020	70,88%	1069	46%
MOR 4	814	349	42,87%	591	59%
MOR 5	1194	828	69,35%	495	25%
MOR 6	373	77	20,64%	87	18%
MOR 7	414	43	10,39%	50	10%
MOR 8	73	8	10,96%	10	48%
TOTAL	5518	2472	44,80%	2488	31%

- **2472 SPBU BAST** adalah SPBU yang sudah **final terdigitalisasi dan terhubung dengan dashboard transaksi digitalisasi SPBU**
- **Pencatatan** nomor polisi kendaraan pada EDC, dimulai pada bulan **Desember 2019**.
- **Tingkat kepatuhan input** nomor polisi kendaraan seluruh SPBU rata-rata sebesar **31%**.

*DODO : 5376 , COCO = 142

Sumber <https://digispbu.telkom.co.id> per 30 Juni 2020 14:21 WIB

Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2013

tentang Penggunaan Sistem Teknologi Informasi dalam Penyaluran BBM

Surat Menteri ESDM No. 2548/10/MEM.S/2018

22 Maret 2018

Ratas Presiden RI dengan Menteri ESDM

14 Agustus 2018

Surat Keputusan Kepala BPH Migas

1. SK Kepala BPH Migas No.38/P3JBT/BPH Migas/Kom/2017
2. SK Kepala BPH Migas No.38/P3JBT/BPH Migas/Kom/2019
Penugasan Badan Usaha Untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian JBT Tahun 2018 - 2020
3. Surat Keputusan BPH Migas No.43/P3JBT/BPH Migas/Kom/2019
Kuota Volume JBT Per Provinsi/Kab/Kota Secara Nasional Tahun 2020
4. Surat Edaran Kepala BPH Migas Nomor 114.E/Ka BPH/2020
Pengendalian Kuota JBT dan Penugasan Tahun 2020
5. Surat Keputusan BPH Migas No.04/P3JBT/BPH Migas/Kom/2020
Pengendalian Penyaluran JBT oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan pada Konsumen Pengguna Transportasi Kendaraan Bermotor untuk Angkutan Orang atau Barang

CATATAN

1. BPH Migas **tidak terlibat dalam** penentuan spesifikasi dan anggaran program digitalisasi SPBU;
2. **Manfaat IT Nozzle** dalam rangka pengawasan BBM menggunakan teknologi yang handal sehingga tepat sasaran dan tepat volume terutama pada BBM Subsidi (JBT: Solar) dan BBM Penugasan (JBKP: Premium);
3. Persentase kepatuhan pencatatan nopol oleh seluruh SPBU yang terdigitalisasi rata-rata sebesar **31%**.

TARGET PENYELESAIAN PROGRAM DIGITALISASI SPBU



1

Target Awal :
31 DESEMBER 2018

Digitalisasi SPBU mulai 31 Agustus 2018

Target : 5.518 SPBU

Status : Tidak tercapai

3

Revisi Target ke-2:
31 DESEMBER 2019

PT Pertamina menyampaikan perubahan komitmen

Target : 5.518 SPBU

Status : Tidak tercapai

5

Revisi Target ke-4:
AGUSTUS 2020

PT Pertamina menyampaikan perubahan komitmen

Target : 5.518 SPBU

Status : Tidak tercapai

Revisi Target ke-1:
28 JUNI 2019

PT Pertamina menyampaikan perubahan komitmen

Target : 5.518 SPBU

Status : Tidak tercapai

2

Revisi Target ke-3:
30 JUNI 2020

PT Pertamina menyampaikan perubahan komitmen

Target : 5.518 SPBU

Status : Tidak tercapai

4



Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Digitalisasi Nozzle SPBU

31 Agustus 2018

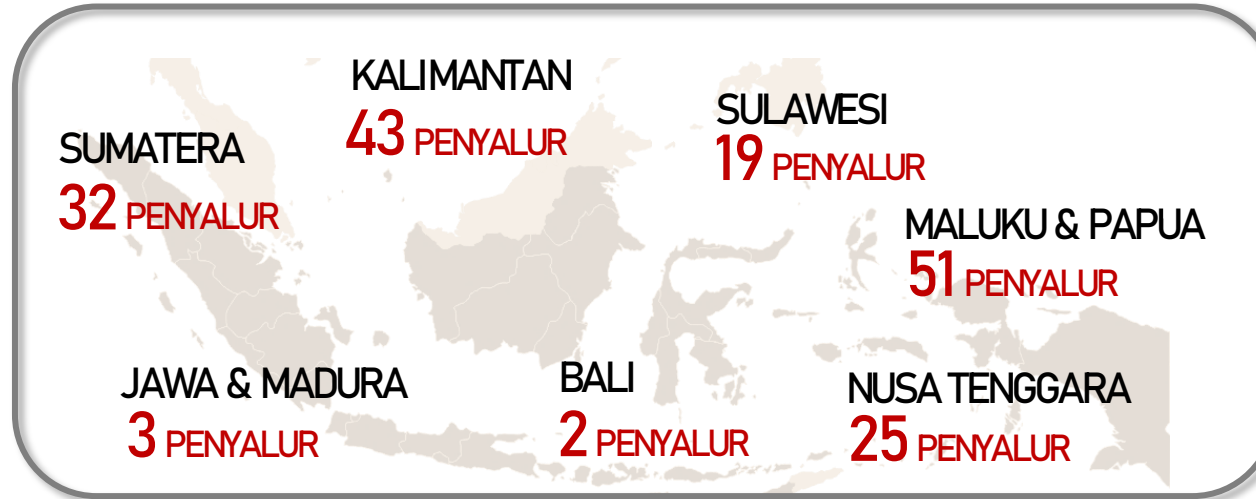


Progress BBM 1 Harga

KEADILAN ENERGI MELALUI **BBM 1 HARGA**

PERMEN ESDM No.36/2016

1. Penugasan P3JBT dan P3JBKP kepada Badan Usaha
2. Pengaturan, pengawasan, dan verifikasi terhadap pendistribusian JBT dan JBKP di lokasi tertentu



2017 s.d 11 Sept 2020

175 Penyalur

● 165

● 10

HARGA JUAL BBM
MENJADI :

Rp.5.150

Rp.6.450



SOLAR



PREMIUM



Tahun 2017-2019

170 penyalur

2017

57 Penyalur

● 54 ● 3

2018

73 Penyalur

● 67 ● 6

2019

40 Penyalur

● 39 ● 1

Ket : ● Pertamina ● AKR

- SK Dirjen Migas Nomor 0062.K/10/DJM.0/2018
- SK Dirjen Migas Nomor 0022.K/10/DJM.0/2019



Tahun 2020-2024

330 penyalur

2020

83 Penyalur

● 83

2021

76 Penyalur

2022

72 Penyalur

2023

56 Penyalur

2024

43 Penyalur

- SK Dirjen Migas Nomor 0008.K/15/DJM.0/2020
- SK Kepala BPH Migas No. 01/P3JBT-P3JBKP/BPH MIGAS/KOM/2020



PROGRESS PROGRAM **BBM 1 HARGA**

Tahun 2020

Target **83**
Penyalur BBM 1 Harga



5 Penyalur
Sudah beroperasi



61 Penyalur
Tahap pembangunan



15 Penyalur
Tahap Perizinan Pemda



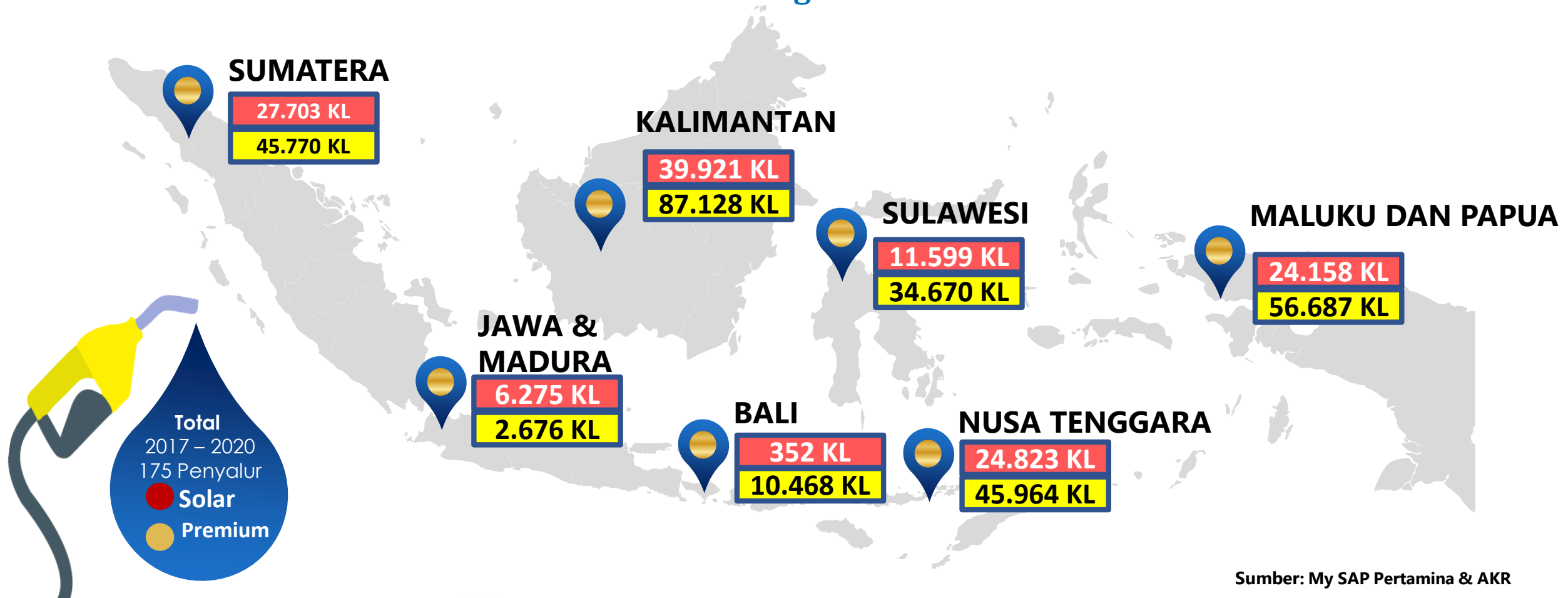
2 Penyalur
Tahap Evaluasi PT Pertamina (Persero)

Catatan :

- ✓ Jumlah Penyalur berdasarkan prioritas operasi di tahun 2020
- ✓ Menunjukkan Progres Pembangunan penyalur sesuai SK Tahun 2020 dan diluar Tahun 2020
- ✓ Lokasi Pembangunan Penyalur BBM 1 Harga Tahun 2020 tersebar di 20 Provinsi (61 Kabupaten, 83 Kecamatan)
- ✓ BPH Migas menugaskan PT Pertamina (Persero) untuk pembangunan penyalur BBM 1 Harga Tahun 2020
- ✓ Data s.d 11 September 2020

REALISASI PENYALURAN **BBM 1 HARGA**

2017 s.d 31 Agustus 2020



Sumber: My SAP Pertamina & AKR



Realisasi Penyaluran BBM

● Solar ● Premium

2017

7.451 KL

13.909 KL

2018

30.932 KL

121.334 KL

2019

53.708 KL

121.334 KL

2020

42.775 KL

93.233KL

TOTAL

134.830 KL

283.363 KL



A. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR GAS BUMI

1. BPH Migas mengharapkan **RITJDGBN** dapat segera **ditetapkan oleh Menteri ESDM** sebagai dasar pelaksanaan lelang ruas pipa gas transmisi.
2. BPH Migas mengharapkan **dukungan Komisi VII DPR RI terhadap** :
 - a. Percepatan penyelesaian pembangunan Pipa Cisem sesuai target, Februari 2022.
 - b. Segera dimulainya pembangunan **Kaliya II**, terutama pipa transmisi dari Kalimantan Timur ke Kalimantan Selatan yang merupakan bagian dari Trans Kalimantan yang ada dalam RPJMN 2020-2024.
 - c. Mengutamakan pemanfaatan pasokan gas dalam negeri.
 - d. Penciptaan **demand** / kebutuhan di sepanjang jalur pipa transmisi, seperti Kawasan Ekonomi Khusus

B. DIGITALISASI SPBU

BPH Migas mengharapkan **dukungan Komisi VII DPR RI terhadap** percepatan penyelesaian program **digitalisasi SPBU** sebagai alat kendali BBM Subsidi (JBT: Solar) dan BBM Penugasan (JBKP: Premium) agar tepat sasaran dan tepat volume, seperti pencatatan nomor polisi kendaraan menggunakan CCTV yang terintegrasi secara *online* dengan BPH Migas.

C. PROGRAM BBM SATU HARGA

BPH Migas mengharapkan **dukungan Komisi VII DPR RI terhadap** percepatan penyelesaian pembangunan dan jaminan keberlangsungan supply BBM, termasuk penyalur BBM Satu Harga yang sudah terbangun oleh Badan Usaha yang mendapatkan penugasan.



TERIMA KASIH

www.bphmigas.go.id

GEDUNG BPH MIGAS

Jl. Kapten P. Tendean No: 28 Jakarta Selatan
12710, Indonesia

Telepon: +6221 5255500, +6221 5212400

Fax: +6221 5223210, +6221 5255656



www.bphmigas.go.id



@bphmigas



@bph.migas



BPH Migas